

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan wilayah di pedesaan memiliki tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Tujuan pembangunan nasional juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Salah satu modal dasar dalam pembangunan adalah penduduk. Penduduk mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan sebuah negara, karena merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, penduduk sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan. Jadi, penduduk yang banyak dan berkualitas merupakan suatu investasi bagi suatu Negara.

Kondisi kependudukan saat ini baik dalam arti jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa Indonesia, situasi dan kondisi kependudukan di Indonesia merupakan fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, bersungguh-sungguh dan berkelanjutan. Penduduk yang banyak namun tidak berkualitas, hanya akan menjadi beban pemerintah. Maka dari itu, salah satu upaya yang telah dan perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan pembangunan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga yang handal sebagai potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemeliharaan lingkungan, dan pembina keserasian manusia dengan sesamanya, dengan masyarakatnya dan dengan lingkungan yang mendukungnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan dalam membina penduduk dan keluarga menjadi faktor dominan dalam pembangunan yang perlu diteruskan dengan tidak saja menjadikan penduduk dan keluarga sebagai arahan atau penikmat pembangunan, namun juga sebagai kekuatan pembangunan yang handal. Apabila penduduk dan keluarga sebagai wahana yang pertama dan utama dalam pembangunan dapat dibina dengan sebaik-baiknya, maka upaya pengembangan penduduk dan membangun keluarga sejahtera mampu membangun sumber daya yang cerdas, terampil dan dinamis tentu akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Masalah ekonomi merupakan hal terpenting dari pembangunan nasional secara umum, karena ekonomi dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, penindasan dan kebodohan. Fungsi ekonomi dalam keluarga begitu penting, karena ekonomi merupakan kegiatan untuk membuat anggota keluarga memiliki *lifeskill* dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh Karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan secara dini, harus diintensifkan dan dimulai dari jajaran keluarga.

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya sehingga mampu memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.

Dalam pembangunan kegiatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga perlu terus dikembangkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I (keluarga miskin), pemerintah telah melakukan berbagai cara dengan melakukan pembentukan kelompok usaha guna menjadikan keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Dalam kehidupan nyata sebagian besar perempuan kurang mampu berperan aktif dalam ekonomi keluarga, sehingga perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung dengan hasil pendapatan suami. Pekerjaan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan perempuan dianggap sebagai penerima pasif pembangunan. Hal ini membuat perempuan mengalami

kondisi ketidakberdayaan didalam lingkungan masyarakat. Padahal perempuan mempunyai andil yang besar dalam membentuk sebuah keluarga yang bermartabat. Lebih dari itu, perempuan juga mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelompok. salah satu buktinya, bahwa perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif rumah tangga.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga maka dibentuklah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kegiatan usaha ini dirintis dan dipelopori oleh BKKBN yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga dalam berwirausaha.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga dapat meningkatkan kualitas kehidupan.

Kelompok UPPKS memegang peranan yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk menjadi modal dasar bagi kesinambungan pembangunan nasional. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga lebih diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Oleh karena itu, program UPPKS sangat penting keberadaannya. Usaha dilakukan guna membina Ibu-Ibu rumah tangga yang termasuk golongan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) agar bisa mendapatkan penghasilan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk diolah dan dikelola menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Karena selain menambah pendapatan bagi keluarganya, penciptaan usaha melalui UPPKS juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu yang suaminya adalah seorang pengangguran.

Fungsi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dengan melakukan usaha ekonomi produktif. Usaha yang dilakukan oleh UPPKS yaitu dengan melakukan pembinaan kewirausahaan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota kelompok.

Program ini merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan dilaksanakan di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Lima Puluh Kota melalui program UPPKS mempercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembinaan program tersebut. Adapun Landasan hukum mengenai pengelolaan UPPKS yang terakhir adalah Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 332/HK.010/F3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Bantuan Modal Usaha Kelompok UPPKS.

Program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok UPPKS telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama itu pula mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang diberikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah kelompok UPPKS yang terdata di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 berjumlah 54 kelompok dengan jumlah anggota keseluruhan kelompok UPPKS berjumlah 981 orang. Namun dari 54 kelompok tersebut, hanya 39 kelompok yang masih aktif. Dan dari 39 kelompok tersebut kegiatannya juga terancam mati suri.

Namun ditengah pasang surut pelaksanaan program UPPKS, ada salah satu kecamatan yang memiliki kelompok UPPKS yang tetap konsisten dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatannya, bahkan anggota kelompoknya telah banyak yang memiliki ekonomi produktifnya secara mandiri. Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Lareh sago Halaban.

Berdasarkan data dari Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Lareh Sago Halaban Kelompok UPPKS di Kecamatan Lareh Sago Halaban meliputi 3 (tiga) kelompok UPPKS yaitu Kelompok Sago Indah dengan jumlah anggota 25 orang, Kelompok Kota Daya dengan jumlah anggota 25 orang,

Kelompok Mawar dengan jumlah anggota 17 orang. Kelompok-kelompok UPPKS tersebut paling tua kelompok Sago Indah dibentuk tahun 1996, kelompok Kota daya dibentuk tahun 2005 dan kelompok Mawar dibentuk tahun 2006 dengan dasar Surat Keputusan Wali Nagari Lareh Sago Halaban, dan kelompok-kelompok dimaksud telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kegiatan Kelompok UPPKS di Kecamatan Lareh Sago Halaban bergerak di bidang Simpan Pinjam dan Kerajinan Songket yang dikerjakan oleh ibu-ibu anggota kelompok. Kegiatan pertemuan dilakukan setiap 1 bulan sekali dan mendapatkan pembinaan dari PKB Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Pemerintahan Nagari Halaban.

Untuk mengembangkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Lareh Sago Halaban banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: (1) Pelatihan, kegiatan pelatihan digunakan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota kelompok dengan melalui pemberian bantuan ilmu pengetahuan, pelatihan bertujuan untuk menciptakan dan membentuk mental kreatif dan inovatif pada diri anggota, kegiatan pelatihan diantaranya ialah pelatihan kewirausahaan, pelatihan inovasi pengemasan, pelatihan manajemen keuangan. (2) Pembinaan, kegiatan pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus pada anggota kelompok sebagaimana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pembinaan diantaranya yaitu pembinaan keterampilan, pembinaan kualitas produksi, pembinaan pemasaran, dan manajemen. Bahwa disamping melakukan pengembangan kreativitas sumber daya manusia (SDM) juga ditumbuhkan kemampuan untuk mengelola usaha-usaha industri rumah tangga, sehingga anggota dapat memiliki penghasilan pendapatan.

Kegiatan tenun songket kelompok UPPKS di Kecamatan Lareh Sago Halaban telah menjadi sumber pendapatan bagi anggotanya, berdasarkan informasi dari PKB Kecamatan lareh Sago Halaban bahwa kegiatan tenun songket telah berkembang menjadi 30 kelompok tenun songket. Sehingga menjadi perhatian bagi Pemerintah Nagari dengan menghimpun semua pengrajin tenun songket dalam satu wadah yang disebut dengan Ikatan Tenun Halaban (ITH) dan

dengan dana desa membangun gedung di Nagari Halaban khusus untuk *show room* hasil tenun songket Halaban yang berfungsi sebagai tempat promosi, pemasaran, pertemuan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Hal ini merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Nagari Halaban guna meningkatkan ekonomi produktif masyarakatnya melalui kelompok UPPKS tersebut.

Hal ini tentunya sangat menarik, karena bisa menjadi tolak ukur bagi kelompok UPPKS lainnya untuk belajar dan menjadikan Kec. Lareh Sago Halaban sebagai acuan dari keberhasilan pengelolaan kelompok UPPKS di daerahnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti *"Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Lareh Sago Halaban"*.

B. Masalah Penelitian

Permasalahan yang masih dijumpai dari kegiatan UPPKS di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kelangsungan kelompok, banyak usaha yang dilakukan oleh para anggota kelompok yang tidak berkembang secara baik. Dalam aspek permodalan, banyak kelompok yang belum mempunyai informasi lengkap tentang bentuk permodalan dan akses dari bantuan tersebut, serta kemampuan kelompok dalam mengelola modal.

Sedangkan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program UPPKS sejauh ini terletak pada: tingkat pemahaman masyarakat (kaum perempuan) terhadap nilai-nilai pemberdayaan masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dari kondisi jumlah Kepala Keluarga perempuan yang ada dan yang bekerja lebih sedikit dari Kepala Keluarga yang ada sehingga masih cukup banyak yang tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan dan bergantung pada suami.

Selain itu juga dukungan pemerintah terhadap upaya pemberdayaan perempuan masih rendah, sehingga tidak sedikit perempuan yang lebih memilih berkiprah di tempat dan bidang yang jauh dari kompetensi yang dimiliki, dan banyak terjadi kasus rapuhnya ketahanan keluarga/rumah tangga sehingga diakhiri dengan perceraian sebagai akibat tuntutan kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi, serta peran lintas sektor/stakeholder/petugas teknis masih kurang dalam menumbuh kembangkan kelompok kegiatan UPPKS. Harapannya adalah

program UPPKS ini dapat memperbaiki kesejahteraan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1(keluarga miskin) di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan masalah penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas program UPPKS berdasarkan perkembangan usaha ekonomi di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana manfaat program UPPKS dilihat dari aspek pendapatan dan kesempatan kerja di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas program UPPKS berdasarkan perkembangan usaha ekonomi di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat program UPPKS dilihat dari aspek pendapatan dan kesempatan kerja di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan IPTEK dan menambah wawasan penulis dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dengan program UPPKS.
2. Sebagai masukan bagi Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat dan DP2KBP3A Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyusun program yang lebih intensif untuk mengembangkan kelompok UPPKS dalam peningkatan pendapatan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I,

sekaligus untuk menyampaikan kondisi yang objektif kelompok UPPKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota,

3. Manfaat pengembangan ilmu, penelitian di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Pelaksanaan program UPPKS di Kecamatan Lareh Sago Halaban, berdasarkan indikator variabel input, proses dan output tergolong sangat efektif.
- H2 : Terjadi perubahan tingkat pendapatan responden secara signifikan pada saat sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

